

Journal Paper Competition Accounting Festival 2026

PENCEGAHAN FRAUND DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Meliana Siburian

Program Studi Prodi D-III Keperawatan Dairi ,Kemenkes Poltekkes Medan

melianasiburian00@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Article history:

Received:

Received in revised form:

Accepted:

Keywords: *Fraud prevention, Good governance, Sustainable development, Public integrity.*

Paper type

Literature review

This study aims to explore how fraud prevention efforts can play a strategic role in supporting the sustainable development agenda in Indonesia. This research is driven by the concern that fraud practices are not merely financial crimes, but serious threats that erode public trust and hinder the equitable distribution of welfare, which are the ideals of development. This study employs a qualitative approach using a systematic literature review method. Data were collected from various reputable scientific journals, current textbooks, and government regulations. The analysis was conducted by dissecting the literature to find the common thread between fraud theory and sustainability principles. The findings indicate that effective fraud prevention—through radical transparency, measurable accountability, and good governance—has a direct positive impact on economic and social sustainability. Strengthening internal controls and adopting digital technology are identified as vital instruments to cut off opportunities for fraud, ensuring that state resources truly reach the people who need them. The novelty of this research lies in the perspective that positions fraud prevention not just as a technical accounting mechanism, but as a moral and strategic pillar within the framework of sustainable development (SDGs). This addresses a gap in the literature that has tended to separate forensic audit issues from macro development issues

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan merupakan komitmen global untuk memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keadilan sosial bagi generasi masa kini maupun masa depan. Agenda ini sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius, salah satunya adalah praktik fraud atau kecurangan dalam pengelolaan sumber daya publik.

Fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa fraud masih menjadi masalah sistemik di berbagai sektor strategis, termasuk pengelolaan anggaran pembangunan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan proyek infrastruktur publik. Laporan berbagai lembaga pengawas menunjukkan bahwa kebocoran anggaran akibat korupsi dan manipulasi administrasi berdampak langsung pada rendahnya efektivitas program pembangunan serta meningkatnya ketimpangan kesejahteraan masyarakat. Ketika dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat disalahgunakan, maka pembangunan tidak hanya mengalami kerugian finansial, tetapi juga kehilangan kepercayaan publik sebagai modal sosial utama pembangunan berkelanjutan.

Di sisi lain, berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas fraud dari perspektif audit forensik, hukum, atau pengendalian internal organisasi secara teknis. Namun, masih terdapat kesenjangan penelitian (research gap) yang mengkaji fraud prevention sebagai bagian integral dari strategi pembangunan berkelanjutan. Kajian mengenai hubungan antara pencegahan fraud, tata kelola yang baik (good governance), dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks integrasi nilai integritas publik dan agenda SDGs.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan konseptual antara isu fraud dan pembangunan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana mekanisme pencegahan fraud melalui transparansi, akuntabilitas, penguatan pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi faktor strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Melalui pendekatan kajian literatur, penelitian ini diharapkan mampu memberikan perspektif baru bahwa pencegahan fraud bukan sekadar mekanisme akuntansi, melainkan fondasi moral dan strategis dalam menjaga keberlanjutan pembangunan nasional.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (literature review). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan fraud dan pembangunan berkelanjutan merupakan fenomena konseptual yang memerlukan analisis teoritis serta sintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya.

Materi Penelitian

Materi penelitian dalam studi ini meliputi konsep, teori, dan praktik yang berkaitan dengan:

1. Fraud dan Fraud Prevention, khususnya berdasarkan *Fraud Triangle Theory* yang menjelaskan faktor penyebab kecurangan melalui unsur tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

2. Good Corporate Governance (GCG) sebagai kerangka tata kelola yang menekankan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.
3. Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development) yang berfokus pada integrasi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan pembangunan nasional.
4. Pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola publik, seperti e-budgeting dan e-procurement, sebagai instrumen pencegahan fraud.

Materi tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi keterkaitan antara strategi pencegahan fraud dan keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Sumber Data

Data penelitian bersifat sekunder yang diperoleh melalui:

- Artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional ($\pm 80\%$) yang diterbitkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- Buku referensi akademik dan dokumen regulasi pemerintah ($\pm 20\%$) yang relevan dalam lima tahun terakhir.

Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan kriteria relevansi topik, kredibilitas penerbit, serta kontribusi teoritis terhadap pembahasan fraud prevention dan sustainable development.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, melalui tahapan:

1. Identifikasi dan seleksi literatur yang relevan
2. Reduksi data berdasarkan tema penelitian
3. Kategorisasi konsep utama
4. Sintesis teori dan hasil penelitian
5. Penarikan kesimpulan secara interpretatif

Penelitian ini tidak menggunakan hipotesis karena bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan konsep pencegahan fraud sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dampak Fraud:

Lebih dari Sekadar Uang

Hasil penelusuran literatur menegaskan bahwa dampak *fraud* terhadap pembangunan berkelanjutan sangatlah destruktif. Kecurangan menyebabkan inefisiensi yang parah dalam alokasi sumber daya nasional. Bayangkan sebuah program pembangunan yang dananya disunat; kualitas outputnya pasti menurun, dampaknya bagi masyarakat menjadi minimal, dan pada akhirnya tujuan pembangunan jangka panjang gagal tercapai. Lebih dari itu, *fraud* menggerus modal sosial yang paling berharga, yaitu kepercayaan (*trust*). Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada institusi publik akibat maraknya korupsi, partisipasi publik dalam pembangunan akan menurun drastis. Padahal, pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi solid antara pemerintah dan warganya.

Membangun Benteng Integritas

Lantas, bagaimana solusinya? Pembahasan kami mengerucut pada satu kesimpulan: pencegahan *fraud* adalah prasyarat mutlak bagi tata kelola yang baik. Mengacu pada *Fraud Triangle*, kita mungkin sulit mengontrol "tekanan" ekonomi setiap individu, namun kita memiliki kendali penuh untuk menutup "peluang". Di sinilah peran vital dari sistem pengendalian internal yang ketat dan transparansi kebijakan.

Penelitian oleh Kurniawan (2019) dan referensi terkait menunjukkan bahwa ketika sebuah institusi menerapkan transparansi misalnya dalam keterbukaan informasi anggaran—ruang gelap yang biasanya digunakan untuk memanipulasi data menjadi terang benderang. Akuntabilitas bukan lagi sekadar laporan pertanggungjawaban di akhir tahun, tetapi menjadi budaya kerja sehari-hari. Tata kelola yang berintegritas ini secara otomatis menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan.

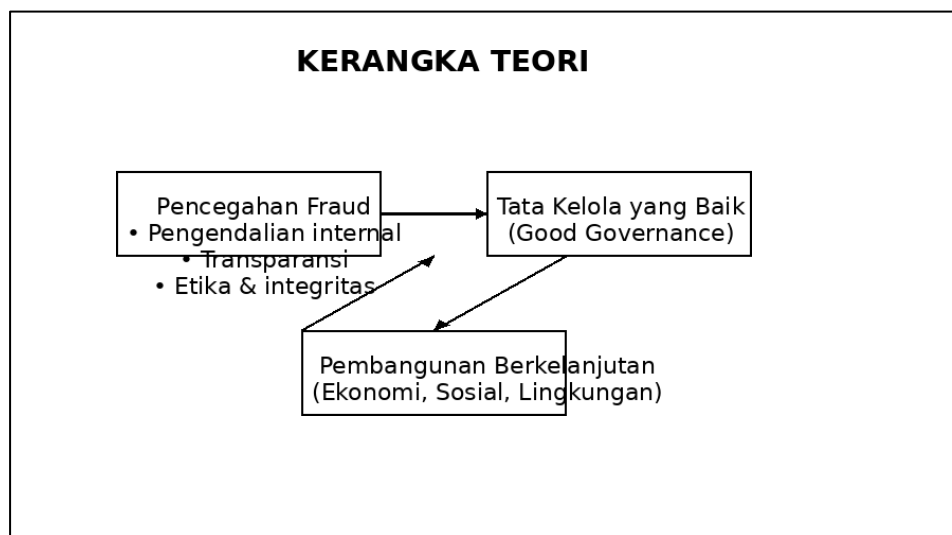
Peran Teknologi Digital

Di era modern, upaya pencegahan ini semakin diperkuat oleh teknologi. Transformasi digital dalam sistem keuangan negara (seperti *e-budgeting* dan *e-procurement*) terbukti ampuh meminimalisir interaksi fisik yang rawan suap dan memangkas peluang manipulasi data. Teknologi menciptakan jejak digital yang sulit dihapus, sehingga meningkatkan rasa takut untuk berbuat curang sekaligus memudahkan pengawasan. Dengan demikian, teknologi bukan hanya alat bantu kerja, melainkan instrumen strategis untuk menjaga integritas pembangunan.

Secara ringkas, strategi pencegahan *fraud* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pengendalian internal, dan digitalisasi adalah investasi jangka panjang. Ia memastikan setiap rupiah uang negara benar-benar dikonversi menjadi kesejahteraan rakyat, selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tabel 1. Strategi Pencegahan Fraud dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

| Strategi Pencegahan Fraud | Penjelasan | Dampak terhadap Pembangunan Berkelanjutan |
|---------------------------|---|---|
| Transparansi | Keterbukaan informasi keuangan dan kebijakan publik | Meningkatkan kepercayaan masyarakat |
| Akuntabilitas | Pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dan program | Mengurangi pemborosan sumber daya |
| Pengendalian Internal | Sistem pengawasan dan prosedur yang ketat | Menekan peluang terjadinya fraud |
| Pemanfaatan Teknologi | Digitalisasi sistem pelaporan dan pengawasan | Mendukung tata kelola berkelanjutan |



Gambar 1. Kerangka Teori

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pencegahan fraud memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Fraud tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik, menghambat efektivitas kebijakan pembangunan, serta memperbesar ketimpangan sosial. Implementasi prinsip tata kelola yang baik melalui transparansi, akuntabilitas, penguatan sistem pengendalian internal, serta pemanfaatan teknologi digital terbukti mampu menutup peluang terjadinya kecurangan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya publik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencegahan fraud seharusnya tidak lagi dipahami sebatas mekanisme administratif atau fungsi audit semata, melainkan sebagai fondasi moral dan strategis dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan. Integrasi antara integritas sumber daya manusia, sistem pengawasan yang kuat, serta transformasi digital menjadi elemen penting dalam menciptakan tata kelola publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif konseptual yang menghubungkan pencegahan fraud dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Studi ini memperluas pemahaman bahwa upaya menjaga integritas tata kelola memiliki implikasi langsung terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi, sosial, dan institusional secara berkelanjutan.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa **keterbatasan**. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan studi literatur sehingga tidak melibatkan data empiris lapangan yang dapat mengukur efektivitas kebijakan secara kuantitatif. Kedua, cakupan analisis masih bersifat konseptual sehingga belum menggambarkan secara spesifik implementasi pencegahan fraud pada sektor atau institusi tertentu.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan studi empiris melalui pendekatan kuantitatif maupun mixed method guna menguji hubungan antara pencegahan fraud, kualitas tata kelola, dan capaian pembangunan berkelanjutan secara lebih terukur. Selain itu, kajian komparatif antar sektor publik maupun antar daerah juga diperlukan untuk menghasilkan model pencegahan fraud yang lebih aplikatif dan kontekstual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., & Zimbelman, M. F. (2019). *Fraud examination* (6th ed.). Boston: Cengage Learning. (Gunakan edisi terbaru jika ada).
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- OECD. (2020). *Public integrity handbook*. Paris: OECD Publishing.
- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the public sector: A conceptual framework. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 405–421. <https://doi.org/10.1108/JFC-11-2016-0066>
- Georgescu, I., & Popescul, D. (2015). Fraud and corruption in the context of sustainable development. *Sustainability*, 7(4), 4443–4459. <https://doi.org/10.3390/su7044443>
- Kurniawan, P. S. (2019). Fraud prevention and good governance: Evidence from public sector organizations. *Journal of Accounting and Investment*, 20(2), 154–168.
- Rae, K., & Subramaniam, N. (2008). Quality of internal control procedures. *Accounting & Finance*, 48(1), 135–164. (Disarankan mencari jurnal pembeding yang lebih baru di atas tahun 2016 untuk memenuhi kriteria 10 tahun).
- Transparency International. (2021). Corruption and sustainable development. *Global Corruption Report*, 1(1), 1–15.
- Zahra, S. A., Priem, R. L., & Rasheed, A. A. (2005). The antecedents and consequences of top management fraud. *Journal of Management*, 31(6), 803–828.
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.